**MAKALAH**

**“HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANERGARAAN”**

Makalah ini Dibuat untuk Memenuhi Tugas yang Diberikan Oleh :

**Koko Adya Winata, SIP., M.Pd**



Oleh : **Kelompok 1**

1. **Anggi Suryani Dewi (2013191006)**
2. **Gilang Awaludin (2013191007)**
3. **Wiam Fadlilah Yusuf (2013191008)**
4. **Mohamad Erias (2013191010)**
5. **Zacarias Romao (2113191002)**
6. **Agung Mulya (2113191003)**
7. **Nerissa Arviana Ridwan (2113191005)**
8. **Viery Viransyah (2113191006)**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG**

**2020**

# KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya, sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah “Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan” ini.

Makalah “Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan” ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini.  
      
Akhir kata kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.

**Bandung, 24 Februari 2020**

**Penyusun**

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR 2](#_Toc33354692)

[DAFTAR ISI 3](#_Toc33354693)

[BAB I 4](#_Toc33354694)

[A. Latar Belakang 4](#_Toc33354695)

[B. Rumusan Masalah 4](#_Toc33354696)

[C. Tujuan 5](#_Toc33354697)

[BAB II 6](#_Toc33354698)

[A. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 6](#_Toc33354699)

[B. Definisi Pendidikan Kewarganegaraan 6](#_Toc33354700)

[C. Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Warga negara 6](#_Toc33354701)

[D. Unsur-unsur kewarganegaraan 7](#_Toc33354702)

[E. Aspek-aspek Kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan 8](#_Toc33354703)

[F. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan 10](#_Toc33354704)

[G. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan 13](#_Toc33354705)

[BAB III 16](#_Toc33354706)

[A. Kesimpulan 16](#_Toc33354707)

[DAFTAR PUSTAKA 18](#_Toc33354708)

# BAB I

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang diwajibkan dari tingkat Sekolah Dasar, menengah, hingga Perguruan Tinggi. Hal ini dimaksudkan agar dapat memupuk karakter mahasiswa untuk memiliki rasa nasionalisme, juga membentuk karakter sosial dan karakter bangsa sejak dini hingga dewasa. Karakter Bangsa adalah perilaku yang diharapkan yang dimiliki oleh warga Negara sebagai cerminan dari Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan pondasi atau modal utama bagi seluruh bangsa Indonesia untuk dapat mempelajari, memahami, dan mencintai setiap aspek dari Indonesia sendiri. Mahasiswa sebagai sebagai bagian dari Pendidikan tingkat tinggi di Indonesia juga turut melaksanakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karena mahasiswa merupakan bibit untuk mempertanggung jawabkan Indonesia kedepannya. Karena itulah diperlukan pendidikan moral dan akademis yang akan menunjang sosok pribadi mahasiswa. Kepribadian mahasiswa akan tumbuh seiring dengan waktu dan mengalami proses pembebenahan, pembekalan, penentuan dan akhirnya pemutusan prinsip diri. Di masa yang akan datang diperlukan ilmu yang cukup untuk dapat mendukung kokohnya pendirian suatu Negara dan mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga Negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela Negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan Negara.

## Rumusan Masalah

1. Apa pengertian Pendidikan Kewarganegaraan ?
2. Apa hakikat Pendidikan Kewarganegaraan?
3. Apa tujuan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan?
4. Apa fungsi Pendidikan Kewarganegaraan ?
5. Apa saja aspek-aspek kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan?
6. Ada berapakah unsur Pendidikan Kewarganegaraan ?
7. Apa karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan?
8. Bagaimana ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan?

## Tujuan

1. Mengetahui pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Mengetahui hakikat Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Mengetahui tujuan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Mengetahui fungsi Pendidikan Kewarganegaraan.
5. Mengetahui aspek-aspek kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan.
6. Mengetahui unsur Pendidikan Kewarganegaraan.
7. Mengetahui karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan.
8. Mengetahui ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan.

# BAB II

**PEMBAHASAN**

## Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Pengertian Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Jadi kesimpulannya hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah setiap warga negara wajib menjaga kesatuan dan persatuan negara, agar negara tersebut utuh dan aman dari serangan atau kerusakan dari negara lain.

## Definisi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang di kerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang di harapkan. Jadi maksud dari definisi pendidikan kewarganegaraan itu sendiri yaitu untuk menumbuhkan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa. Kesimpulan akan pentingnya suatu pendidikan berbangsa dan bernegara agar terciptanya keseibangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negra dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara

## Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Warga negara

Tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai imu pengetahuaan dan teknologi serta seni.

Fungsi pendidikan kewarganegaraan yaitu :

a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.

b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-

karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

## Unsur-unsur kewarganegaraan

***Ius sanguinis***

Ius sanguinis adalah unsur kewarganegaraan yang berdasar pada darah atau keturunan.Berarti bahwa seseorang akan memiliki kewargangeraan yang sama seperti yang diturunkan oleh orang tua atau ayah ibu biologisnya. Jadi, apabila ayah atau ibu dari seorang anak

memiliki kewarganegaraan Indonesia, anak tersebut akan otomatis menjadi WNI, dimanapun ia dilahirkan. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan unsur kewarganegaraan ini. Selain Indonesia, beberapa unsur-unsur kewarganegaraan yang menggunakan Ius Sanguinis antara lain China, Filipina, Korea Selatan, Turki, Yunani, Spanyol, Portugal, Belanda, Jerman, dan Inggris. Unsur ini biasanya diterapkan oleh negara-negra dengan sejarah perjuangan yang panjang.

***Ius soli***

Secara harfiah, ius soli berarti hak untuk wilayah. Dalam konteks kewarganegaraan, hal ini berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasar tempat atau wilayah orang tersebut dilahirkan. Berbeda engan ius sanguinis, unsuk kewarganegaraan ini biasanya diterapkan oleh negara yang ingin mengembangkan jumlah penduduknya. Jadi apapun warga negara orang tua seoarang anak, apabila anak tersebut dilahirkan di negara yang menggunakan unsur ius soli, anak tersebut akan mendapat kewarganegaraan berdasar tempat kelahiran. Akan tetapi, pada saat ini pemberian kewarganegraan berdasar ius soli sudah diperketat. Untuk mendapat unsur-unsur kewarganegaraan dengan ius soli, salah satu orang tua dari anak tersebut harus mempunyai kewarganegaraan yang sah sesuai dengan tempat anak tersebut lahir. Beberapa negara yang menerapkan ius soli antara lain Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Kanada, Jamaika, Meksiko, dan beberapa negara di benua Amerika lainnya.

***Naturalisasi***

Naturalisasi atau yang disebut unsur pewarganegaraan adalah cara untuk mendapat

kewarganegaraan Indonesia dengan mengajukan permohonan. Selain untuk warga negara asing, naturalisasi juga bisa diberlakukan untuk seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan mempunyai kewarganegaraan ganda. Di Indonesia, kewarganegaraan Indonesia bisa diberikan kepada warga negara asing apabila warga negara asing tersebut telah berjasa kepada negara republik indonesia dan menetap di atas 15 tahun ke atas atau bisa pula mengajukan kepada pemerintah.

Dari berbagai unsur yang ada,saya menyimpulkan bahwa warga negara dapat mendapatkan kewarganegaraannya dengan beberapa cara,ada yang melalui keturunan kedua orang tuanya,ada pula yang berdasarkan daerah ataupun karena perpindahan tempat tinggal atau

negaranya.

## Aspek-aspek Kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Beberapa kompetensi yang menurut Branson (Budimansyah dan Suryadi, 2008: 55) perlu dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan yaitu “berdasarkan kompetensi yang perlu dikembangkan, terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu civic knowledge, civic skill, dan civic dispositions”.

Kemudian, Branson (Wuryan dan Syaifullah, 2008: 78) menjelaskan bahwa: Cakupan civic knowledge meliputi pengetahuan tentang sistem politik, pemerintahan, konstitusi, undang-undang, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya. Sementara civic skill mencakup keterampilan intelektual, sosial dan psikomotorik. Sedangkan civic dispositions mencakup sifat karakter pribadi warga negara yang mana meliputi tanggung jawab moral, disiplin diri dan hormat terhadap martabat setiap manusia, kemudian sifat karakter publik meliputi kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, hormat terhadap aturan (rule of the law), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi.

Sejalan dengan pendapat di atas, dalam Depdiknas (2007: 2) dicantumkan beberapa aspek kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu:

Pengetahuan Kewarganegaraan (civic knowledge) Menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian multidisipliner.

Keterampilan Kewarganegaraan (civic skills) Meliputi keterampilan intelektual (intellectual skills) dan keterampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Watak kepribadian Kewarganegaraan (civic disposition) Watak kepribadian kewarganegaraan sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substansif dan essensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dimensi watak atau karakter kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “muara” dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya.

Apabila ditinjau dari tujuan pendidikan kewarganegaraan seperti yang disampaikan Wuryan dan Syaifullah (2008: 77) maka dapat dilihat sasaran lain dari kompetensi yang dapat

dikembangkan.

Baik civics atau Ilmu Kewarganegaraan maupun Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, warga negara yang kreatif, warga negara yang bertanggungjawab, warga negara yang cerdas, warga negara kritis, dan warga negara yang partisipatif. Lebih lanjut, Wuryan dan Syaifullah (2008: 77) mengungkapkan beberapa kemampuan dasar lainnya, yaitu memperoleh informasi, kerjasama, dan melakukan berbagai

kepentingan secara benar.

Berdasarkan beberapa pandangan ahli di atas saya dapat memyimpulkan bahwa aspek-aspek kompetensi yang dapat di kembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan terbilang banyak, antara lain pengetahuan (civic knowledge),keterampilan (civic skil), karakter (civic dispositions), tanggungjawab (civics responsibilities), kecerdasan (civics intelligence) dan kemampuan partisipasi (civics participation).

## Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan

Karakteristik dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau tanda yang menunjukan suatu hal berbeda dengan lainya. PKn sebagai mata pelajaran yang sangat penting bagi siswa memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan cabang ilmu pendidikan lainnya. Karakteristik PKn ini dapat dilihat dari objek, lingkup materinya, strategi pembelajaran, sampai pada sasaran akhir dari pendidikan ini. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang  
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Adapun karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah :

1. PKn termasuk dalam proses ilmu sosial (IPS)
2. PKn diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dari seluruh program sekolah dasar sampai perguruan tinggi
3. PKn menanamkan banyak nilai, diantaranya nilai kesadaran, bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. PKn memiliki ruang lingkup meliputi aspek Persatuan dan Kesatuan bangsa, Norma, hukum dan peraturan, Hak asasi manusia, Kebutuhan warga negara, Konstitusi Negara, Kekuasan dan Politik, Pancasila dan Globalisasi
5. PKn memiliki sasaran akhir atau tujuan untuk terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara.
6. PKn merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia.
7. PKn mempunyai 3 pusat perhatian yaitu *Civic Intellegence* (kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional maupun sosial), *Civic Responsibility* (kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab) dan *Civic Participation* (kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial maupun sebagai pemimpin hari depan)
8. PKn lebih tepat menggunakan pendekatan belajar kontekstual (CTL) untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia. *Contextual Teaching and Learning* (CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari
9. PKn mengenal suatu model pembelajaran VCT (*Value Clarification Technique*/Teknik Pengungkapan Nilai), yaitu suatu teknik belajar-mengajar yang membina sikap atau nilai moral (aspek afektif).

Dari karakteristik yang ada, terlihat bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang memiliki karakter berbeda dengan mata pelajaran lain. Walaupun PKn termasuk kajian ilmu sosial namun dari sasaran / tujuan akhir pembentukan hasil dari pelajaran ini mengharapkan agar siswa sebagai warga negara memiliki kepribadian yang baik, bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh kessadaran karena wujud cinta atas tanah air dan bangsanya sendiri sehingga tujuan NKRI bisa terwujud. Seperti yang diungkap oleh Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd.,Ph.D (Dosen Pascasarjana UNP kosentrasi PKn) bahwa setiap negara pasti memiliki tujuan, hanya warga negara yang baiklah yang dapat mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu PKn memiliki peran yang sangat besar untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang bisa mengemban semua permasalahan negara dan mencapai tujuan negaranya.

Keberadaan PKn dengan karakteristik seperti ini mestinya menjadi perhatian besar bagi masyarakat, komponen pendidik dan negara. Hal ini disebabkan karena PKn banyak mengajarkan niai-nilai pada siswanya. Niai-nilai kebaikan, kebersamaan, pengorbanan, menghargai orang lain dan persatuan ini jika di tanamkan dalam diri siswa bisa menjadi bekal yang sangat berhagra dalam khidupan pribadi maupun berbangsa dan bernegara. Siswalah yang akan menjadi cikal bakal penerus bangsa dan yang akan mempertahankan eksistensi negara maka dari itu mereka sangat memerlukan pelajaran PKn dalam konteks seperti ini.

John J. Patrick dalam tulisan ‘Konsep inti PKn’ mengatakan PKn memiliki kriteria dimana diartikan berkenaan dengan kepentingan warga negara. Ada 4 kateori yaitu pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan, keahlian kognitif warga negara, keahlian partisipatori dan kebaikan pendidika kewarganegaraan. Jika empat kategori ini hilang dari kurikulum PKn makan PKn dapat dianggap cacat.

Walaupun pemerintah sudah memberi perhatian besar pada pelajaran PKn, semua itu tidak akan cukup jika komponen pendidik, siswa, orang tua, dan masyarakat tidak berpadu untuk bekerjasama menjalankan inti pelajaran PKn ini. Berkaitan dengan kandungan nilai-nilai dalam PKn saja misalnya, banyak guru yang luput mengajarkan nilai-nilai kehidupan pada saat mengajar karena terburu dengan meteri sesuai kurikulum, siswa belajar hanya orientasi materi sehingga *civic intelligent* saja yang terpenuhi. Meskipun materi PKn saat ini tidak banyak mencantumkan secara konkret nilai-nilai kehidupan dalam silabus pengajaran, semsetinya guru mampu berperan memasukan nilai-nilai ini sebagai *hiden curicullum* bagi siswa.

## Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Sebagai program pendidikan yang menyeruakan mengenai kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia yang berbasis pada filosofi bangsa, yakni pancasila,pendidikan kewarganegaraan memiliki daya jelajah dalam ruang lingkup pembahasan tentang :

1. Filsafat Pancasila, yakni sebagai filsafat yang mengkaji isi jiwa suatu bangsa begitupun Pancasila, yang memenuhi ciri-ciri sebagai filsafat dalam hal ini adalah filsafat bangsa yang membahas tentang isi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan tentang isi jiwa peradaban bangsa Indonesia dan nilai-nilai asli yang hidup dalam masyarakat Indonesia sehari-hari jauh sebelum Indonesia merdeka dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan kemanusiaan, dengan bangsa dan negara, dengan rakyat Indonesia, dan dengan keadilan hidup.

2. Identitas Nasional, yaitu merupakan sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal sebagai kepribadian/karakter suatu bangsa. Identitas nasional Indonesia dapat dirumuskan pembidangannya dalam tiga bidang sebagai berikut:

Pertama, identitas fundamental, yakni pancasila sebagai filsafat bangsa, hukum dasar, pandangan hidup, etika politik, paradigm pembangunan.

Kedua, identitas instrumental yang meliputi UUD 1945 sebagai konstitusi, Sang Saka Merah Putih sebagai bendera negara,Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.

Ketiga, identitas alamiah yang meliputi Indoensia sebagai negara kepulauan dan kemajemukan terhadap sukunya, budayanya, agamanya.

3. Bangsa dan Negara Indonesia, bangsa Indonesia terbentuk dari pengalaman (empiris) peran dari segenap suku-suku yang tersebar diseluruh kepulauan nusantara. Konsepsi Bangsa dan Negara Indonesia meliputi proses terbentuknya negara, teori-teori terbentuknya negara, unsur-unsur negara, tujuan negara, bentuk-bentuk negara, bentuk negara Indonesia, proses bangsa Indonesia menjadi Negara Kesatuan republik Indonesia dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Warga Negara Indonesia. Warga negara adalah anggota dari suatu persekutuan yang didirikan atas kekuatan bersama, dilaksanakan atas tanggung jawab bersama dan ditujukan untuk kepentingan bersama. Dalam PKn, konsepsi warga negara Indonesia mencakup materi tentang asas kewarganegaraan, warga negara Indonesia, cara memperoleh warga negara Indonesia, dan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

5. Demokrasi Indonesia. Indonesia selalu berdiri diatas dasar kekeluargaan, diatas dasar musyawarah, diatas dasar yang namanya demokrasi. Demokrasi Indonesia selalu membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi Indonesia mencakup hal-hal yang meliputi konsepsi demokrasi, norma-norma yang mendasari demokrasi, komponen penegak demokrasi, model-model demokrasi, demokrasi Indonesia, perkembangan demokrasi di Indonesia, pemilihan umum (PEMILU), pemilihan umum di Indonesia, pemilihan kepada daerah (Pilkada).

6. Konstitusi Indonesia meliputi sistem konstitusional, materi muatan konstitusi, klasifikasi konstitusi, perubahan konstitusi, perubahan UUD 1945 menurut pasal 37 amandemen keempat UUD 1945, konstitusi Indonesia dari masa ke masa, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

7. Negara Hukum, meliputi hal-hal seperti Negara Hukum di Eropa Kontinental, Negara Hukum Anglo Saxon, Negara Hukum Indonesia, Penegakan hukum,

8. Hak Asasi Manusia, mencakup hal-hal meliputi Konsep dasar Hak Asasi Manusia, hubungan Hak Asasi Manusia dengan kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia, nilai-nilai dasar dalam HAM, sejarah penegakan HAM di Dunia, Bentuk-bentuk HAM, pelanggaran HAM, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia, Konsespsi HAM, kewajiban asasi manusia =, dan tanggung jawab asasi manusia dalam UUD 1945 dan menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

9. Geopolitik Indonesia, mencakup wawasan Nasional, teori-teori paham kekuasaan, teori-teori geopolitik, teori geostrategic global, latar belakang pemikiran wawasan nasional Indonesia, konsepsi wawasan nusantara, kedudukan wawasan nusantara, arah pandang wawasan nusantara, fungsi wawasan nusantara, implementasi wawasan nusantara dalam kerangka konsep geopolitik, tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara

10. Geostrategic Indonesia meliputi ruang lingkup geostrategic Indonesia (ketahanan nasional), asas-asas ketahanan nasional, permasalahan geostrategic Indonesia (ketahanan nasional Indonesia), geostrategic Indonesia dalam menciptakan ketahanan nasional.

# BAB III

**PENUTUP**

## Kesimpulan

Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah setiap warga negara wajib menjaga kesatuan dan persatuan negara, agar negara tersebut utuh dan aman dari serangan atau kerusakan dari negara lain. Pendidikan kewarganegaraan itu sendiri yaitu untuk menumbuhkan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa. Unsur-unsur Pendidikan kewarganegaraan yaitu ada ius sanguinis,ius soli dan juga naturalisasi.

Berdasarkan kompetensi yang perlu dikembangkan, terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu civic knowledge, civic skill, dan civic dispositions. Karakteristik PKn ini dapat dilihat dari objek, lingkup materinya, strategi pembelajaran, sampai pada sasaran akhir dari pendidikan ini. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang  
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan :

* 1. Filsafat Pancasila
  2. Identitas Nasional
  3. Bangsa dan Negara Indonesia
  4. Warga Negara Indonesia
  5. Demokrasi Indonesia
  6. Konstitusi Indonesia
  7. Negara Hukum
  8. Hak Asasi Manusia
  9. Geopolitik Indonesia
  10. Geostrategic Indonesia

# DAFTAR PUSTAKA

<https://slideplayer.info/slide/13140211/>

<https://duniapendidikan.co.id/hakikat-pkn/>

<https://kewarganegaraanblog.wordpress.com/2013/10/25/definisi-pendidikan-kewarganegaraan-menurut-ahli/>

<https://guruppkn.com/pengertian-pendidikan-kewarganegaraan-menurut-para-ahli>

<https://pendidikan.co.id/pengertian-ppkn-dan-tujuan-menurut-para-ahli/>

<https://h4dyme.wordpress.com/2010/05/17/hakikat-fungsi-dan-tujuan-pendidikan-kewarganegaraan-di-sd/>

<http://athaanakcerdas.blogspot.com/2011/12/hakekat-fungsi-dan-tujuan-pkn-di-sd.html>

<http://dosen-ppkn.blogspot.com/2017/07/4-unsur-unsur-negara.html>

<https://www.slideshare.net/rifkiristiovan/unsurunsur-negara-pkn-kelas-x>

<http://teguh-gooo-enjoe.blogspot.com/2013/02/karakteristik-pkn-sebagai-pendidikan.html>

Bahmuller,C.F.,Patrick.J. *Principles and Practices of Education for Democratic*

*Citizenship :International Perspectives and Projects*. ERIC

<http://winnylinova.blogspot.com/2010/03/karakteristik-pendidikan-kewarganegraan.html>